

KLIPPING BERITA MEDIA MASSA



Sabtu-Senin, 20-22 Oktober 2018



**BADAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR WILAYAH
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT**

KATA PENGANTAR

Klipping Media Massa adalah kumpulan guntingan berita yang kami sajikan secara rutin. Guntingan berita ini kami seleksi dari berita yang muncul di media cetak. Adapun tema berita yang kami pilih adalah berita yang berkaitan dengan organisasi dan substansi Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah dan yang berkaitan dengannya.

Kami berharap klipping ini bermanfaat untuk monitoring media BPIW.

Hormat kami

Tim penyusun

DAFTAR ISI

No	Media	Tanggal	News Title	Resume
1	Bisnis Indonesia (halaman 7)	Senin, 22 Oktober 2018	Memburu Rekor demi Rekor	Sektor Jalan tol benar-benar menorehkan kinerja cemerlang dalam 4 tahun terakhir.
2	Bisnis Indonesia (halaman 8)	Senin, 22 Oktober 2018	Infrastruktur Dikebut untuk Gairahkan Ekonomi	Pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah akan terus dipacu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kota Semarang.
3	Bisnis Indonesia (halaman 11)	Senin, 22 Oktober 2018	Berita Foto	Proyek Meikarta : Foto aerial pembangunan gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini.
4	Bisnis Indonesia (halaman 12)	Senin, 22 Oktober 2018	Daerah Wajib Terapkan Perizinan Online	Kasus suap yang masih terjadi di level pemerintah daerah yang melibatkan kepala daerah harus segera diakhiri dengan mendorong layanan perizinan berbasis online dan terpadu.
5	Bisnis Indonesia (halaman 23)	Senin, 22 Oktober 2018	Pembangunan Hanya di 28 Menara	Hiruk-pikuk megaprojek berskala kota Meikarta menimbulkan banyak pertanyaan, salah satunya tentang berkelanjutan proyek.
6	Bisnis Indonesia (halaman 9)	Sabtu, 20 Oktober 2018	Kementerian ATR/PBN Jamin Lahan Tol	Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) menjamin proses penyediaan lahan untuk pembangunan jalaln tol.
7	Bisnis Indonesia (halaman 14)	Sabtu, 20 Oktober 2018	Berita Foto	Warga memeriksa kapal yang terdampar akibat menyusutnya debit air Waduk Gajah Mungkur karena kemarau panjang di Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah.
8	Media Indonesia (halaman 2)	Sabtu, 20 Oktober 2018	Berita Foto	Dampak kemarau panjang : warga memeriksa selang air irigasi sawah di Waduk Gajah Mungkur yang debit airnya menyusut karna kemarau panjang di Kecamatan Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah, kemarin.
9	Koran Tempo (halaman 2)	Akhir pekan, 20-21 Oktober 2018	Izin Meikarta Baru Terbit untuk 84,6 Hektare	Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan baru 84,6 hektare lahan proyek Meikarta yang sesuai dengan aturan tata ruang.
10	Koran Tempo (halaman 4)	Akhir pekan, 20-21 Oktober 2018	Rumah untuk Rakyat Terhambat Kendala Harga Lahan dan Perizinan	Direktur Jendral Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan pemerintah masih terus menekan angka kekurangan pasokan alias backlog perumahan yang masih tinggi.
11	Koran Tempo (halaman 2)	Senin, 22 Oktober 2018	Berita Foto	Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah Kuat Aman Cepat (Kumac) di Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, kemarin.
12	Koran Tempo (halaman 20)	Senin, 22 Oktober 2018	Dua Ruas Jalan Tol Baru Beroperasi Bulan Ini	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan meresmikan sejumlah ruas jalan tol bulan ini, yakni tol Pejagan-Pemalang seksi 3 dan seksi 4 serta bagian pertama tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocini).
13	Kompas (halaman 2)	Sabtu, 20 Oktober 2018	Panel Rumah Instan Dinantikan	Minat masyarakat korban gempa di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, membangun rumah instan sederhana sehat atau risha terkendala ketersediaan panel, material utama konstruksi hunian yang diklaim tahan gempa itu.
14	Kompas (halaman 11)	Minggu, 21 Oktober 2018	Jembatan Musi IV Tersambung	Jembata Musi IV Palembang akhirnya tersambung Jumat malam.

Judul	Memburu Rekor demi Rekor	Tanggal	Senin, 22 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (halaman 7)		
Resume	Sektor Jalan tol benar-benar menorehkan kinerja cemerlang dalam 4 tahun terakhir.		

► PROYEK JALAN TOL

Memburu Rekor demi Rekor

Sektor Jalan tol benar-benar menorehkan kinerja cemerlang dalam 4 tahun terakhir. Panjang jalan tol yang beroperasi hingga akhir 2018 diestimasi melampaui capaian 36 tahun pembangunan jalan tol. Namun, pembangunan yang masif juga memunculkan sejumlah rekor baru.

peluang kerja sama karena anggaran negara tidak mencukupi untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur.

"Melalui skema KPBU, pemerintah bertujuan mengatasi ketimpangan pendanaan infrastruktur, terutama jalan tol demi ketepatan waktu penyelesaiannya sehingga dapat memberi manfaat nyata bagi negara dan masyarakat," kata Basuki.

Direktur Utama PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) Armand Hermawan mengatakan bahwa penjaminan membuat tingkat kelayakan pinjaman meningkat sehingga bisa mengurangi biaya dana, salah satu komponen dalam biaya proyek.

PII, tuturnya, masih memiliki ruang yang cukup besar untuk mendanai proyek-proyek jalan tol.

"Masih ada banyak [proyek jalan tol] yang akan dilelang. Dalam waktu dekat kami berharap bisa menjamin [tol Semarang—Demak]," tuturnya. Selain umum, penjaminan proyek infrastruktur termasuk jalan tol—berdasarkan kajian IGF Institute dan Universitas Indonesia—balk memberi nilai tambah lebih besar dibandingkan dengan biaya investasi proyek.

Armand memonitorkan proyek jalan tol Pandaan—Malang akan menciptakan nilai tambahan bruto senilai Rp14,95 triliun atau 2,5 kali dari investasi pembangunan jalan tol tersebut sebanyak Rp4,85 triliun.

LEBIH BERAGAM

Selain penjaminan, pendanaan proyek jalan tol juga lebih beragam. Badan usaha pun gencar menggalang dana



Shutterstock.com

melalui beragam instrumen, baik pinjaman maupun penerbitan surat utang.

Ajang Pertemuan Tahunan Dana Moneter Internasional-Bank Dunia di Bali 2 pekan silam juga menorehkan rekor baru.

PT Hutama Karya (Persero) menandatangani tiga kesepakatan pendanaan senilai US\$2,32 miliar atau setara dengan Rp31,12 triliun.

Dana segar akan mengucur dalam bentuk pinjaman, *cash deficiency support* (CDS) dan monetisasi aset.

Berdasarkan catatan *Bisnis*, kesepakatan ini menjadi pendanaan terbesar untuk satu badan usaha.

Di ruas Terbanggi Besar—Pematang Panggang dan Pematang Panggang—Kayu Agung, Hutama Karya akan mendapat pinjaman sindikasi senilai Rp9,16 triliun dan fasilitas CDS sebanyak Rp5,19 triliun.

Sementara itu, di ruas Pekanbaru—Dumai, Hutama Karya mendapat fasilitas pinjaman dan CDS senilai Rp12,30 triliun dari PT Bank Mega Tbk.

Hutama Karya juga akan mendapat dana segar sebanyak Rp4,50 triliun dari sindikasi bank asing dan bank nasional.

Dana ini akan menambah pemenuhan ekuitas perseroan dengan jalan tol akses Tanjung Priok menjadi *underlying*.

Direktur Keuangan Hutama Karya Anis Anjani mengatakan bahwa pinjaman yang diperoleh perseroan mendapat jaminan dari pemerintah. Dengan adanya penjaminan, proyek jalan tol Trans-Sumatra, lanjutnya, layak mendapat pinjaman.

Pendanaan jumbo yang diraih Hutama Karya, berdasar catatan *Bisnis*, melanjutkan pemecahan rekor pinjaman sindikasi untuk jalan tol pada Juli 2018 yang diraih PT Jasamarga Jalanlayang Cikampek.

Saat itu, anak perusahaan PT Jasa Marga Tbk. tersebut diguyur kredit senilai Rp11,36 triliun dari 16 lembaga keuangan.

Jumlah itu sejauh ini menjadi yang terbesar setelah pada 2012, sindikasi perbankan juga mengucurkan pinjaman Rp8,80 triliun untuk PT Lintas Marga Sedaya, pemilik konsesi tol Cikopo—Palimanan.

Dus, dengan semakin masifnya pembangunan jalan tol, rekor apa lagi yang akan tercipta? ■

Rivni Maulana
rivni.maulana@bisnis.com

Badan Pengatur Jalan Tol, Kementerian Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat, mencatat selama 2015—2017, panjang jalan tol yang beroperasi bertambah 332 kilometer.

Sepanjang 2018, ruas tol baru bakal bertambah 604 kilometer. Alhasil, jalan tol baru yang beroperasi dalam 4 tahun terakhir akan mencapai 936 kilometer, melampaui panjang jalan tol yang dibangun pada 1974—2014 sejauh 748,70 kilometer.

Adapun, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono menargetkan pembangunan jalan tol baru sepanjang 1.852 kilometer hingga akhir 2019.

Pembangunannya diyakui guna menapang konektivitas antarwilayah dan menurunkan biaya logistik. Dua hal itu menjadi bagian dari agenda pembangunan pemerintahan Joko Widodo—Jusuf Kalla.

Perubahan paradigma menjadi salah

► **Sebanyak 10 proyek jalan sepanjang 706,67 kilometer mendapat penjaminan.**

► **Penjaminan membuat tingkat kelayakan pinjaman meningkat sehingga bisa mengurangi biaya dana.**

satu faktor agar pembangunan jalan tol bisa dilakukan secara masif. Bila sebaliknya badan usaha menanggung banyak risiko, kini negara turun tangan untuk menjamin sebagian risiko agar proyek jalan tol layak dibangun.

Saat ini, negara melalui badan usaha penjaminan infrastruktur turut menjamin keberlangsungan proyek jalan tol. Sedikitnya ada 10 proyek jalan sepanjang 706,67 kilometer yang mendapat penjaminan. Nilai kesepuluh proyek tersebut mencapai Rp109,23 triliun.

Penjaminan tersebut umumnya diberikan untuk proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Pemerintah memang gencar membuka

TREN POSITIF PENGOPERASIAN JALAN TOL

Dalam tiga tahun terakhir (2015—2017), jalan tol yang beroperasi di Indonesia telah bertambah sepanjang 332 kilometer. Adapun, dari Januari sampai dengan pertengahan Juli 2018, panjang jalan tol yang telah beroperasi adalah 110,32 km. Pemerintah sendiri menargetkan tambahan 473,9 km panjang tol yang terbagi di 13 ruas akan beroperasi pada tahun ini.



JALAN TOL YANG BEROPERASI 2015-2017

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)	Operator	Mulai Operasi
1	Gempol—Pandaan	12	PT Jasa Marga Pandaan Tol	12 Juni 2015
2	Porong—Gempol (Kejapanan—Gempol)	3,50	PT Jasa Marga (Persero) Tbk	6 Mei 2015
3	Cikampek—Palimanan	116,7	PT Lintas Marga Sedaya	13 Juni 2015
JUMLAH		132,2		

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)	Operator	Mulai Operasi
1	Surabaya—Mojokerto seksi 4	18,50	PT Jasa Marga Surabaya Mojokerto	19 Maret 2016
2	Pejagan—Pematang Sekeloa 1 & 2	20,20	PT Pejagan Pematang Sekeloa Road	16 Juni 2016
3	Kertosono—Mojokerto seksi 3	5	PT Marga Harjaya Infrastruktur	Desember 2016
JUMLAH		43,70		



Sumber: Kementerian PUPR

Bisnis/Ilham Maulana

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)	Operator	Mulai Operasi
1	Akses Tanjung Priok	11,40	Belum ada Operator	13 April 2017
2	Gempol—Pasuruan seksi 1—A2	7,90	PT Trans Marga Jatim Pasuruan	6 April 2017
3	Gempol—Pasuruan seksi 1-A1	7,80	PT Trans Marga Jatim Pasuruan	3 Agustus 2017
4	Kertosono—Mojokerto seksi 2	19,90	PT Marga Harjaya Infrastruktur	10 September 2017
5	Semarang—Solo seksi 3	17,50	PT Trans Marga Jateng	25 September 2017
6	Palembang—Indralaya seksi 1	7,75	PT Hutama Karya (Persero)	12 Oktober 2017
7	Medan—Binjai Seksi 2—3	10,60	PT Hutama Karya (Persero)	13 Oktober 2017
8	Medan—Kualanamu—Tb. Tinggi seksi 1—6	41,60	PT Jasamarga Kualanamu Toll	13 Oktober 2017
9	Bekasi—Cawang—Kampung Melayu Seksi 1B & 1C	8,40	PT Kresna Kusuma Dyandra Marga	3 November 2017
10	Soreang—Pasirjaja	8,15	PT Citra Marga Lintas Jabar	4 Desember 2017
11	Surabaya—Mojokerto seksi 1B, 2, 3	15,47	PT Jasamarga Surabaya Mojokerto	Desember 2017
JUMLAH		156,60		

JALAN TOL YANG BEROPERASI 2018*

No	Ruas Jalan Tol	Panjang (km)	Operator	Mulai Operasi
1	Bakauheni—Terbanggi Besar segmen Pelabuhan Bakauheni—1C Bakauheni	8,90	PT Hutama Karya (Persero)	21 Januari 2018
2	Bakauheni—Terbanggi Besar segmen Lematung—Kotabaru	5	PT Hutama Karya (Persero)	21 Januari 2018
3	Ngawi—Kertosono seksi 1—3	47,95	PT Ngawi Kertosono Jaya	29 Maret 2018
4	Solo—Ngawi (1C Ngawi—Ngawi)	4	PT Jasamarga Solo Ngawi	29 Maret 2018
5	Bogor Ring Road (Seksi 2B (Kedung Badak—Simpang Yasmin)	2,65	PT Marga Sarana Jabar	7 Juni 2018
6	Gempol—Pasuruan seksi 2 (Rembang—Pasuruan)	6,60	PT Jasamarga Gempol Pasuruan	22 Juni 2018
7	Solo—Ngawi seksi Kartasura—Gragan	35,22	PT Jasamarga Solo Ngawi	15 Juli 2018
JUMLAH		110,32		

Keterangan: *) Monitoring pertengahan Juli

Judul	Infrastruktur Dikebut untuk Gairahkan Ekonomi	Tanggal	Senin, 22 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (halaman 8)		
Resume	Pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah akan terus dipacu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kota Semarang.		

► PEMBANGUNAN DI JAWA TENGAH

Infrastruktur Dikebut untuk Gairahkan Ekonomi

SEMARANG — Pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah akan terus dipacu sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Kota Semarang.

redaksi@bisnis.com

Presiden Joko Widodo mengatakan, pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah merupakan salah satu fokus pemerintah sehingga pembangunan infrastruktur seperti jalan tol akan semakin digencarkan.

"Jawa Tengah sedang kami kebut untuk infrastruktur dengan selesainya beberapa proyek seperti jalan tol Pejagan—Pemalang yang selesai pada akhir November dan Jalan Tol Semarang—Batang rencananya selesai Desember 2018," ujarnya, akhir pekan lalu.

Menurutnya, dengan selesainya jalan tol akan memudahkan interkoneksi antarwilayah dan diharapkan akan mendongkrak perekonomian masyarakat. Sebab, jika infrastruktur baik maka perekonomian juga akan mengalami peningkatan.

Selain itu, dia menyatakan, pemerintah melakukan berbagai terobosan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur. Pasalnya, pembangunan infrastruktur sangat penting untuk meningkatkan gairah ekonomi masyarakat.

"Pembangunan infrastruktur sangat penting. Dan di sini Jawa Tengah sedang kami genjot dalam waktu dekat beberapa jalan tol di Pemalang dan Semarang—Batang akan beroperasi sebagai wujud komitmen pemerintah meningkatkan infrastruktur daerah," katanya.

► **Pemerintah tidak akan berlama-lama untuk menentukan sikap terkait dengan proyek jalan tol Bawen—Yogyakarta.**

Ketika disinggung mengenai rencana pembangunan tol Bawen—Yogyakarta, dia menegaskan pemerintah tidak akan berlama-lama untuk menentukan sikap.

Jokowi menjelaskan, saat ini rencana pembangunan masih dalam studi dan sesegera mungkin diputuskan. Hal ini, untuk menjawab pertanyaan masyarakat mengenai rencana pembangunan proyek tol Bawen—Yogyakarta.

"Yū mengenai rencana pembangunan jalan tol Bawen—Yogyakarta sedang dalam tahap studi dan segera akan diputuskan," katanya.

KUNJUNGAN WISMAN

Dalam perkembangan lain, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah optimistis target kunjungan 1 juta wisatawan mancanegara (wisman) tahun ini akan tercapai.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar) Jateng Urip Sihabudin mengatakan realisasi kunjungan wisman ke Jateng hingga September 2018 telah mencapai 700.000. Jumlah tersebut telah melewati target dalam Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 2018 sebanyak 600.000 kunjungan.

"Target satu juta wisman merupakan bagian dari target yang diminta Kemenpar untuk 2019 sebanyak 1,2 juta. Kalau dari target daerah sudah lewat dan kalau pertumbuhannya sama dengan tahun-tahun sebelumnya, insyaallah [target 1 juta wisman] tercapai," ujarnya kepada *Bisnis*, pekan lalu.

Kendati realisasinya baru mencapai 70% hingga kuartal III/2018, pihaknya yakin target tersebut akan tercapai. Pasalnya, mendekati akhir tahun biasanya ada lonjakan kunjungan wisman ke Jateng.

Urip menyatakan pihaknya terus berupaya meningkatkan daya saing destinasi prioritas. Selain itu, pengembangan pasar melalui peningkatan promosi dan penjualan, serta peningkatan kualitas *event* turut menjadi perhatian.

Untuk meningkatkan potensi kawasan wisata baru, pengembangan kawasan di luar kawasan strategis pariwisata nasional (KSPN) pun terus dilakukan. Beberapa daerah dinilai memiliki potensi yang setara dengan KSPN.

"Beberapa destinasi yang potensial antara lain Prambanan, Semarang, Solo, dan Baturaden," tuturnya.

Sementara itu, pelaku wisata di Provinsi Jawa Tengah menilai, kurangnya *branding* untuk beberapa tempat wisata. Pasalnya, selama ini Jateng hanya menonjolkan empat wisata unggulan seperti Dieng, Borobudur, Karimunjawa dan Sangiran.

Ketua Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata (Asita) Ja-

teng Joko Suratno mengatakan selama ini kurangnya *branding* dan pengelolaan kerap menjadi kendala dalam pengembangan pariwisata di Jateng. Selain itu, aksesibilitas menuju tempat wisata juga harus dipikirkan oleh pemerintah.

"Selama ini yang masih jadi kendala adalah *branding* dan pengelolaan. Sebetulnya Jateng mempunyai banyak potensi wisata yang sedang berkembang, sehingga bantuan dari pemerintah harus dimaksimalkan," katanya kepada *Bisnis*.

Namun, dia pun mengakui beberapa kemajuan terutama di bidang transportasi seperti adanya Bandara di Karimunjawa telah banyak membantu. Oleh karena itu, pariwisata Jateng dinilai sudah memiliki daya saing secara nasional.

"Tak dapat dipungkiri pariwisata Jateng memang sedang tumbuh. Ini seiring dengan kemudahan transportasi yang disediakan, sehingga mempermudah wisatawan untuk mengunjungi tempat wisata yang dituju," katanya.

Dia menambahkan Asita Jateng sedang melirik wisata religi untuk ditawarkan. Pasalnya, potensi wisata religi di Jawa Tengah cukup baik seperti napak tilas jejak Walisongo.

Menurutnya, wisata religi sangat potensial khususnya untuk wisatawan domestik. Sebab, wisata religi tidak mengenal hari libur maupun bulan dan dipastikan selalu ramai pengunjung.

"Kami rasa wisata religi di Jateng cukup menjanjikan. Tinggal pengelolaannya saja diperbaiki, sehingga bisa jadi opsi untuk wisatawan ke Jateng selain wisata alam," katanya.

(K28/Lucky L. Leatemia) 

Judul	Berita Foto	Tanggal	Senin, 22 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (halaman 11)		
Resume	Proyek Meikarta : Foto aerial pembangunan gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini.		

► **PROYEK MEIKARTA**



Antara/Hafidz Mubarak A

Foto aerial pembangunan gedung-gedung apartemen di kawasan Meikarta, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, belum lama ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berencana memeriksa salah satu bos sekaligus putera dari pemilik Lippo Grup Mochtar Riady, yaitu James Riady terkait dengan kasus dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi.

Judul	Daerah Wajib Terapkan Perizinan Online	Tanggal	Senin, 22 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (halaman 12)		
Resume	Kasus suap yang masih terjadi di level pemerintah daerah yang melibatkan kepala daerah harus segera diakhiri dengan mendorong layanan perizinan berbasis online dan terpadu.		

► SUAP PROYEK MEIKARTA

Daerah Wajib Terapkan Perizinan Online

JAKARTA — Kasus suap yang masih terjadi di level pemerintah daerah yang melibatkan kepala daerah harus segera diakhiri dengan mendorong layanan perizinan berbasis online dan terpadu.

M.G. Noviarizal Fernandez & Rinaldi M. Azka
 redaksi@bisnis.com

Kendati pemerintah pusat acapkali menggaungkan sistem izin online dan terintegrasi, tidak semua pemerintah daerah menerapkan hal itu. Kendala teknis atau hambatan lain sering dijadikan alasan untuk menunda implementasi.

Padahal, sistem perizinan secara online dinilai lebih efektif dan mengurangi interaksi antara pemohon izin dengan instansi yang berwenang.

Kasus suap perizinan proyek hunian Meikarta milik Grup Lippo menunjukkan pentingnya agar sistem izin di tingkat daerah dibuat secara terintegrasi dan online.

"Pengurusan izin terintegrasi seperti *online single submissions* [OSS] menjadi penting," ujar Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djajili di Jakarta, Jumat (19/10).

perubahan tata ruang untuk sisa lahan dari total 500 hektare sesuai rencana akan dikelola untuk pembangunan Meikarta.

Sofyan menyebut pengembang proyek Meikarta belum melakukan permohonan izin tambahan terkait tata ruang lahan sisa tersebut.

"Masalahnya sesuai dengan rencana tata ruang pembangunan, 84 ha sudah sesuai waktu itu. Dan itu masih membutuhkan perubahan tata ruang yang selain itu," tuturnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Lembaga EmrusCorner Emrus Sihombing menilai persoalan mendasar terletak pada pelayanan publik oleh aparat sipil negara (ASN).

"Ketika masyarakat berurusan dengan pelayanan publik di instansi pemerintah, acapkali terjadi oknum ASN berperilaku seperti tuan, yang disembah dengan upeti. Sangat menyedihkan. Mereka ini berperan sebagai pemilik instansi pemerintah, di mana mereka bekerja," tuturnya, Sabtu (20/10).

Hal ini lanjutnya, dapat dilihat dari penggunaan bahasa tubuh,



► Pengembang proyek Meikarta belum melakukan permohonan izin tambahan terkait dengan tata ruang lahan sisa.

Dia menjelaskan, keperluan pembangunan proyek Meikarta sudah terpenuhi izin tata ruangnya untuk 84 hektare lahan yang sudah mulai dibangun. Sementara itu, untuk sisa dari total 500 hektare rencana proyek, masih menunggu permohonan izin lanjutan.

"Kita kan tidak ada masalah, waktu itu Dirjen Tata Ruang, Dirjen Pengendalian menyampaikan surat kepada bupati, bahwa yang sudah sesuai dengan perizinan tata ruang itu penyelesaiannya sudah 84 hektare, dan itu supaya diselesaikan sesuai dengan peraturan perizinan yang berlaku," tuturnya.

Menurut Sofyan, kalau ada perubahan rencana tata ruang itu akan ada siklusnya. Adapun urusan Meikarta dengan Kementerian ATR menyangkut tentang

cara memandang, gaya berdiri, tekanan suara, respons yang berbelit-belit dan sebagainya. Semua itu, katanya, memosisikan ASN sebagai lebih dominan dalam menentukan proses komunikasi pelayanan. Inilah yang mendorong terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik di Indonesia.

Oleh karena itu, menurutnya, peristiwa operasi tangkap tangan (OTT) oknum terkait dengan pembangunan Meikarta, harus menjadi pintu masuk bagi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempen RB) melakukan revolusi mental dan mendasar dalam sistem pelayanan publik di seluruh instansi pemerintah di tanah air secara sistematis, terstruktur dan masif. □

Judul	Pembangunan Hanya di 28 Menara	Tanggal	Senin, 22 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (halaman 23)		
Resume	Hiruk-pikuk megaprojek berskala kota Meikarta menimbulkan banyak pertanyaan, salah satunya tentang berkelanjutan proyek.		

Pembangunan Hanya di 28 Menara

Hiruk-pikuk megaprojek berskala kota Meikarta menimbulkan banyak pertanyaan, salah satunya tentang keberlanjutan proyek. *Bisnis* mengunjungi lokasi proyek Meikarta untuk melihat langsung progres yang tengah berlangsung saat ini.

Foto: U. Ulfah & Maria Elena
redaksi@bisnis.com

Perjalanan kami dimulai pada pukul 10.30 pada Jumat (19/10) dari kantor kami di bilangan Jl. Mawar Manayur Jakarta Pusat menuju megaprojek Meikarta yang disebut proyek dengan investasi terbesar oleh Grup Lippo, yaitu sebesar Rp278 triliun.

Jalanan tidak begitu padat dan dalam 1 jam kami sudah tiba di gerbang tol Cibatu yang menjadi akses langsung kawasan Meikarta. Papan selamat datang terlihat ramah dan usang seperti tidak terawat. Warna biru dan oranye lambang khas Meikarta pun semakin memudar.

Tanda tulisan Meikarta yang berada di simpang susun jalan tol pun kini tak berwarna. Hanya menyisakan besi-besi usang tak megah seadanya bertuliskan 'Meikarta, the future is here today'. Rencana pembangunan infrastruktur, termasuk jalan empat susun juga belum keliatan dibangun. Saat memasuki kawasan, telah berdiri enam menara apartemen Orange County yang masih dalam proses pembangunan. Seluruh hamparan jangkang tersebut juga dipasangi spanduk besar dengan nama masing-masing menara beserta lambang Grup Lippo dan mitra kerja pengembangan menara.

Terpapang lambang konsultan arsitek Kengo Kuma, Mitsubishi, dan Grup Lippo pada menara Irvine, Westwood, dan Pasadena, kemudian lambang Sanki Sofian dan Grup Lippo pada menara Barbank, selain itu lambang Mitsubishi, Kalina, dan Grup Lippo pada menara Glendoline dan Newport.

Menurut pengamatan Binus, pengerjaan apartemen Orange County secara struktur sudah terlihat selesai, tetapi masih terlihat aktivitas pekerja dalam pengembangan.

Apartemen Orange County tersebut ditulis sebagai apartemen premium dan kawasan CBD Meikarta. Kami

Sebagian calon pembeli yang datang ke Meikarta berujung sekadar ingin tahu kelanjutan proyek tersebut, dan sebagian lagi meminta refund.

juga melihat plang Tatal Ruang Persada terpapang sebagai kontraktor Orange County, menara C—D dan E—F.

Nemudian kami berputar arah untuk menuju pengembangan proyek lainnya yang aktivitas pekerjaannya paling ramai, dengan jarak menara lebih dari 1 km dari Orange County. Tampak 14 blok yang masih dalam tahapan pengerjaan, dengan setiap blok terdiri atas 28 menara sehingga satu distrik tersebut terdiri atas 28 menara.

Konstruksi 28 menara tersebut telah berdiri dengan jumlah lantai sekitar 8 lantai hingga 14 lantai. Menurut rencana, menara itu akan dibangun dengan tinggi 32 lantai dan 42 lantai.

Salah satu petugas keamanan menjelaskan akan dibuat satu bangunan untuk komersial dan sebuah taman di depan 28 menara tersebut yang kini juga tengah dilakukan pekerjaan konstruksi. Bangunan itu juga sedang dalam proses pengerjaan.

Dari pengamatan Binus, dari ke 28 menara tersebut tak satupun plang nama kontraktor yang terpapang pada proyek pengembangan tersebut. Salah satu pekerja menjelaskan 28 menara tersebut dikerjakan oleh beberapa kontraktor, salah satunya PT Clavennio Mitra Perkasa, kontraktor asal China.

TERASA GERSANG

Masih segar di ingatan kami ketika kali pertama memasuki Meikarta dilakukan pada Mei 2017, seluruh kawasan dipagari seng berwarna biru dan terdapat bunyik bunyik gas berwarna warni yang menghiasi kawasan. Pada kala itu pun, walaupun cuaca sangat terik, rumpuk hijau yang segar juga masih tampak.



Lahan di Meikarta yang belum dibangun.



Pembangunan di salah satu dari 28 menara Apartemen Meikarta.



Suasana di galeri pemasaran proyek Meikarta.

Kini hal tersebut tinggal kemandu, balon gas dan berbagai macam atribut pemasangan sudah tak terlihat lagi. Begitu juga dengan rumpuk hijau, semua telah berubah berwarna kuning, semakin terasa gersang.

Kawasan taman Central Park yang terhampar dalam buatan dan berbagai macam bunga tampak tak terurus hingga layu dan tak berwarna lagi. Pagar pembatas kawasan dengan seng biru juga terlihat porak poranda dan banyak terlihat pekerja melepas pagar pembatas tersebut. Saat dikonfirmasi Binus, pihak Meikarta mengaku hal tersebut telah dilakukannya sejak 1 bulan belakangan untuk mempersiapkan kepada masyarakat progres pembangunan kawasan dan terdapat beberapa lahan yang telah terpancang tiang pancang.

Meski demikian, lahan tersebut hanya terpancang tiang pancang tetapi tidak ada aktivitas konstruksi.

Saat kami mengunjungi Maxx Box Marketing Gallery Meikarta, sekitar pukul 13.30, aktivitas pemasangan pun masih tetap dilakukan. Setidaknya

terdapat 6 hingga 7 sales executive yang aktif menjelaskan produk Meikarta. Sekitar 20 calon konsumen baru terlihat mengunjungi show unit dan menerima penjelasan harga dan perkembangan proyek.

Berdasarkan penelusuran Binus, Meikarta kini lebih mendahulukan untuk menawarkan unit di blok menara yang sedang dalam proses pengembangan yaitu, blok 38022, 38023, 39021, 39022, 39023, 50021, 50022, 50023, 51021, 51022, 52021, 52022, 53021, dan 53022.

Pada Jumat (19/10), suasana Maxx Box relatif sepi. Hanya sedikit konsumen yang mendarungnya untuk meminta kejelasan perkembangan proyek setelah munculnya dugaan suap perizinan Meikarta dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi oleh KPK.

Saat kami berkunjung kembali ke lokasi hari-hari, Sabtu (20/10), mulai banyak konsumen yang mendarangi Maxx Box. Selain meminta kepastian kelanjutan proyek, tidak sedikit konsumen yang juga menuntut untuk mengajukan refund atas unit yang telah dibelinya.

Salah satu konsumen dengan inisial JN meminta kepastian Meikarta atas komitmennya untuk membangun unit yang telah dibelinya, yaitu 1 unit di menara S1 tipe 35 dengan harga sekitar Rp270 juta. Menara tersebut berada di luar yang dibangun saat ini. "Saya marah, tower A dan B sudah dibangun tapi tower S belum dibangun sama sekali, tapi serah terimanya juga masih lama. Desember 2019, [saya mengeri] Kalau melihat [proses] pembangunan memang relatif [waktunya]," ujar JN kepada Binus, Sabtu (20/10).

JN mengaku pada saat pertama kali membeli, pihak Meikarta mengaku telah mengantongi perizinan untuk pembangunan pada tahap pertama dan untuk setiap menara yang telah dipasokkan. Dia tidak berniat untuk melakukan refund dan hanya ingin memastikan keberlanjutan pembangunan unitnya.

"Kalau refund kan masalah izin, kalau izin jalan, ngapain refund, tetapi waktu beli memang tidak diperlihatkan nomor izin," kata dia.

Namun, ia mengaku terdapat beberapa kejanggalan sistem pembayaran unit Meikarta. JN menggunakan KPA

melalui Bank Nobu dengan tenor 10 tahun dan cicilan Rp3 juta per bulan. "Saya sudah membayar cicilan ketujuh tapi dapat surat masih cicilan kelima, ada sedikit miss yang mau saya nyatakan juga. Pendebetannya juga agak tapi tidak masalah," papar JN.

Sementara itu, konsumen lain menyatakan akan melakukan refund karena pengembangan proyek Meikarta yang dimulainya berjalan lambat. "Karena kami kan investor, beli untuk diinvestasikan, jadi maunya dapat return yang cepat, ya dengan kasus seperti ini pasti akan terlambat. Lebih baik saya tarik dari awal," kata dia. Di galeri pemasaran, konsumen tersebut berniat dengan pihak Meikarta yang masing-masing diwakilkan oleh PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) sebagai pengembangan Meikarta dan Grup Lippo sebagai holding dari PT MSU.

Pihak Meikarta membuat semacam forum group diskusi dengan konsumen di Maxx Box dan membagi dua kelompok konsumen yang mengajukan refund dan kelompok konsumen yang hanya meminta keterangan.

Pihak Meikarta menjelaskan dan menegaskan kepada konsumen bahwa pengembangan Meikarta akan terus berjalan sesuai dengan rencana. Mereka juga menjelaskan bahwa kasus OTT tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan masa keberlanjutan proyek.

Selain itu, pihak Meikarta juga mengajak konsumen untuk berhilling lokasi proyek menggunakan mobil golf (golf cart) untuk menunjukkan proses pengembangan proyek Meikarta.

Namun, ada yang berbeda dari kunjungan kedua Binus pada Sabtu (20/10), berdasarkan pengamatan Binus saat ikut berhilling kawasan Meikarta pada hari kedua, kawasan Meikarta terlihat lebih tertangani. Banyak pekerja yang menyirami bunga dan tanaman di Central Park dan memangkas rumput dan ilalang di pinggir jalan Meikarta.

Ketika ditanyakan soal unit apartemen yang sudah terjual hingga lebih dari 150.000 unit, pihak Meikarta menyatakan angka tersebut kini telah jauh berkurang akibat banyaknya konsumen yang tidak melanjutkan ke akad dan membatalkan pembelian.

Oleh karena itu, pihak Meikarta masih melakukan aktivitas pemasaran hingga sampai saat ini. □

Proyek Meikarta Masih Sesuai RTRW

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan dugaan suap perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi terkait persoalan perizinan IMB atau Izin Membangun Bangunan.

Namun, saat berbenam dengan konsumen proyek Meikarta pada Sabtu (20/10), pihak PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) menegaskan bahwa yang mereka pasarkan sampai saat ini tidak menyalahi undang-undang yang berlaku di Indonesia. "Kami tidak mungkin menyalahi aturan, yang sudah dibangun pasti ada perizinan," kata wakil dari MSU dalam pertemuan tersebut.

Pihak MSU mengklaim bahwa Meikarta dikembangkan oleh Grup Lippo yang telah berada di kawasan Cikarang lebih dari 20 tahun. "Zin lokasi sudah pasti kami ada karena tidak mungkin tanpa izin kami bisa memiliki lahan ratusan hektare, dari 30 tahun yang lalu kita sudah ada," papar dia.

Namun, ketika ditanyakan kembali izin apa saja yang sudah dikantongi, pihaknya tidak menjawab secara terperinci.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang dan Tanah Kementerian ATR/Budi Sarungan menjelaskan pihak Meikarta telah diminta untuk menghentikan pembangunan proyek sejak Maret 2018 lalu.

Hal tersebut dikarenakan perizinan membangun unit Meikarta belum ada. Dia memaparkan izin yang dimiliki Meikarta adalah izin induk. Sementara itu, izin induk tidak bisa dijadikan sebagai IMB satuan bangunan.

Dia juga mengatakan pihak Meikarta sekarang sedang mengurus izin IMB dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL), dan itu semua berdasarkan rencana tata ruang wilayah (RTRW). Budi mengatakan lahan Meikarta seluas 84,3 hektare sudah sesuai dengan rencana tata ruang Kab. Bekasi.

Namun, lahan di luar 84,3 hektare tidak sesuai dengan RTRW.

Pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUK) Pemerintah Kabupaten (PemKab) Bekasi yang enggan menyebutkan namanya mengatakan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Bekasi mengacu pada RTRW karena RTRW belum dipelankan hingga saat ini.

Dia menyebutkan izin Meikarta untuk 84,3 hektare yang dikeluarkan telah sesuai dengan RTRW. "Zin yang kami berikan sudah sesuai dengan RTRW."

"Kami ini kan sesuai dengan rekomendasi pemerintah saja. Semuanya kan juga bergantung rekomendasinya juga. Gubernur bilang setuju ya kami setuju. Makanya kan memang baru 84 hektare aja," kata dia kepada Binus, Jumat (19/10).

Namun, Dinas PUPR Pemkab Bekasi tidak menjelaskan secara terperinci terkait macam perizinan yang telah dikeluarkan. www.tribunnews.com/2018/10/20

Judul	Kementerian ATR/PBN Jamin Lahan Tol	Tanggal	Sabtu, 20 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (halaman 9)		
Resume	Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) menjamin proses penyediaan lahan untuk pembangunan jalan tol.		

Kementerian ATR/BPN Jamin Lahan Tol

JAKARTA — Kementerian Agraria & Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menjamin proses penyediaan lahan untuk pembangunan jalan tol.

Rivki Maulana
rivki.maulana@bisnis.com

Proses pembebasan lahan akan dipercepat agar target jalan tol sepanjang 1.852 kilometer pada 2019 bisa tercapai.

Menteri ATR/BPN, Sofyan Djalil mengatakan, pihaknya akan segera menetapkan sebuah kawasan untuk dibebaskan bila sudah ditetapkan untuk pembangunan jalan tol.

Dia menambahkan, ATR/BPN selanjutnya akan melakukan pemetaan dan sosialisasi kepada masyarakat yang lahannya akan digunakan untuk jalan tol.

Menurut Sofyan, pembayaran lahan akan dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (BUJT) atau ditalangi oleh badan usaha jalan tol.

"Saya pikir target [pembangunan jalan tol] dari sisi tanah tidak ada masalah. Memang ada kendala, tapi tidak menjadi hambatan secara umum," ujarnya kepada *Bisnis*, Kamis (18/10).

Berdasarkan data Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), sepanjang 2018 ruas jalan tol baru ditargetkan mencapai 609 kilometer. Sementara itu pada tahun depan, ruas tol baru yang dijadwalkan beroperasi mencapai 736 kilometer.

Sofyan menerangkan, salah satu ruas tol yang dipercepat pembebasan lahannya adalah tol Bogor—Ciawi—Sukabumi atau Bocimi di Seksi I ruas Ciawi—Cigombong

► **Pembayaran lahan akan dilakukan oleh Lembaga Manajemen Aset Negara (BUJT) atau ditalangi oleh badan usaha jalan tol.**

Kebut Bangun Jalan



13 Ruas Tol yang Siap Beroperasi

1. Pejagan—Pemalang seksi 3 dan 4	(37,3 km)
2. Pemalang—Batang segmen Sewaka—Simpang Susun (SS) Pemalang	(5,4 km)
3. Solo—Ngawi segmen SS Sragen—Ngawi	(50,9 km)
4. Ciawi—Sukabumi Seksi I Ciawi—Cigombong	(15,4 km)
5. Pemalang—Batang seksi I dan II / SS Pemalang—Batang	33,8 km)
6. Semarang—Solo seksi 4 dan 5 / Salatiga—Kartasura	(32,5 km)
7. Batang—Semarang	(75 km)
8. Ngawi—Kertosono segmen Wilangan—Kertosono / Porsi PUPR	(39,1 km)
9. Kertosono—Mojokerto seksi 4	(0,9 km)
10. Porong—Kejaparan / relokasi Porong—Gempol	(6,3 km)
11. Gempol—Pasuruan seksi 3 Pasuruan—Grati	(12,2 km)
12. Pasuruan—Probolinggo seksi 1-3 / Grati—Probolinggo Timur	(32,4 km)
13. Bakauheni—Terbanggi Besar Paket 1-4	(126,9 km)

Sumber : Kementerian PUPR

BISNIS/YAYAN INDRAYANA

sepanjang 15,4 kilometer.

Menurut Sofyan, keberadaan tol tersebut amat mendesak untuk mengurangi kemacetan di lintas Bogor—Sukabumi.

BOCIMI

Corporate Secretary PT Waskita Toll Road (WTR), Alex Siwu mengatakan, ruas Bocimi Seksi I tengah dalam proses uji layak operasi (ULO). Dia menambahkan, persoalan lahan di akses keluar masuk tol yang sempat menggagalkan telah tuntas.

"Kami berharap bisa secepatnya selesai sehingga [Tol Bocimi] bisa beroperasi tahun ini," ujarnya kepada *Bisnis*, Jumat (19/10).

Selain ruas Bocimi Seksi I, WTR juga siap mengoperasikan ruas Pejagan—Pemalang Seksi III dan IV sepanjang 37,3 kilometer. Alex menyebut, pengoperasian ruas tersebut tinggal menunggu waktu peresmian. WTR tidak akan memungut tarif tol selama 1 minggu setelah peresmian.

Menteri Pekerjaan Umum & Perumahan Rakyat (PUPR), Basuk Hadimuljono mengatakan, selama Oktober 2018, tiga ruas tol siap beroperasi, yakni Bocimi Seksi I, Pejagan—Pemalang Seksi III dan IV, dan Solo—Ngawi segmen SS Sragen—Ngawi.

Secara kumulatif, dalam periode 2015–2019, ruas tol baru yang beroperasi diharapkan mencapai 1.852 kilometer.

Pemerintah, melalui Kementerian ATR/BPN berkomitmen untuk mempercepat pembebasan lahan agar target tersebut bisa tercapai.

"Tiga ruas ini siap dioperasikan, tinggal menunggu jadwal peresmian," ujarnya.

Selanjutnya pada November 2018, dua ruas tol juga dijadwalkan beroperasi, yakni Pemalang—Batang seksi I dan II (SS Pemalang—Batang) sepanjang 33,8 kilometer dan Semarang—Solo seksi 4 dan 5 (Salatiga—Kartasura) sejauh 32,5 kilometer. Sebulan berselang, tujuh ruas tol sepanjang 292,8 kilometer juga dijadwalkan beroperasi.

Basuki mengatakan, pembangunan jalan tol secara masif akan meningkatkan konektivitas antarwilayah dan menurunkan biaya logistik.

Jalan tol baru juga diharapkan menurunkan waktu tempuh di jalur logistik utama dari 2,7 jam per 100 kilometer menjadi 2,2 jam per 100 kilometer. Walhasil, penurunan waktu tempuh bisa memangkas rasio biaya logistik terhadap PDB dari 24% menjadi 20%.

Dalam catatan *Bisnis*, kinerja infrastruktur Indonesia mengalami peningkatan dalam indeks kinerja logistik (Logistic Performance Index/LPI) yang diterbitkan Bank Dunia. Pada 2016, skor infrastruktur dalam LPI mencapai 2,65 dan meningkat menjadi 2,89 pada 2018. ■

Judul	Berita Foto	Tanggal	Sabtu, 20 Oktober 2018
Media	Bisnis Indonesia (halaman 14)		
Resume	Warga memeriksa kapal yang terdampar akibat menyusutnya debit air Waduk Gajah Mungkur karena kemarau panjang di Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah.		

► WADUK GAJAH MUNGKUR KERING



Warga memeriksa kapal yang terdampar akibat menyusutnya debit air Waduk Gajah Mungkur karena kemarau panjang di Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah, Jumat (19/10). Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan 68% wilayah Indonesia akan terlambat mengawali musim hujan, yakni awal musim hujan

di 342 Zona Musim (ZOM) sebanyak 43 pada November 2018, sementara itu 22,8% pada Oktober di 78 ZOM, dan selebihnya pada Desember 2018.

Judul	Berita Foto	Tanggal	Sabtu, 20 Oktober 2018
Media	Media Indonesia (halaman 2)		
Resume	Dampak kemarau panjang : warga memeriksa selang air irigasi sawah di Waduk Gajah Mungkur yang debit airnya menyusut karna kemarau panjang di Kecamatan Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah, kemarin.		



ANTARA/MOHAMMAD AYUDHA

DAMPAK KEMARAU PANJANG: Warga memeriksa selang air irigasi sawah di Waduk Gajah Mungkur yang debit airnya menyusut karena kemarau panjang di Kecamatan Wuryantoro, Wonogiri, Jawa Tengah, kemarin. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi 68% wilayah Indonesia akan terlambat mengawali musim hujan, yakni pada November-Desember 2018. Puncak musim hujan diprakirakan terjadi pada Januari-Februari 2019.

Judul	Izin Meikarta Baru Terbit untuk 84,6 Hektare	Tanggal	Akhir pekan, 20-21 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (halaman 2)		
Resume	Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan baru 84,6 hektare lahan proyek Meikarta yang sesuai dengan aturan tata ruang.		

Izin Meikarta Baru Terbit untuk 84,6 Hektare

JAKARTA — Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil menyatakan baru 84,6 hektare lahan proyek Meikarta yang sesuai dengan aturan tata ruang. Ia menyatakan lembaganya telah mengirimkan surat kepada Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin perihal ini.

Menurut Sofyan, pembangunan Meikarta untuk fase awal seluas 84,6 hektare secara tata ruang tidak bermasalah. Namun, menurut dia, untuk luasan lainnya masih membutuhkan beberapa perubahan karena belum memenuhi aturan tata ruang. "Kalau ada perubahan tata ruang, ada siklusnya," katanya

di kantor Kementerian KoordinatorPerekonomian, Jakarta, kemarin.

Pernyataan Sofyan ini dikuatkan oleh mantan Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar. Ia menyatakan, pada 2017, Pemerintah Kabupaten Bekasi mengirimkan usul perubahan rencana detail tata ruang (RDTR) agar proyek Meikarta bisa masuk tata ruang Kabupaten Bekasi. Saat itu, kata Deddy, Kabupaten Bekasi hanya bisa menampung proyek Meikarta seluas 84,6 hektare. Agar proyek bisa mendapat izin penggunaan tanah di atas 700 hektare, Kabupaten Bekasi harus merevisi tata

ruangnya. "Usulan tidak komprehensif, makanya saya tolak," kata Deddy Mizwar kepada *Tempo*.

Menurut Deddy, saat itu Pemerintah Kabupaten Bekasi tidak bisa menunjukkan lokasi lahan pengganti. Ia memberi waktu agar pemerintah Bekasi mengirim proposal revisi, tapi tak kunjung ia terima. Akhirnya, revisi RDTR itu tak pernah dibahas lagi.

Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya dugaan penyuapan dalam proses sejumlah izin pada pembangunan proyek Meikarta. Dari barang bukti yang dimiliki KPK, ada lahan seluas 774 hektare yang tengah diurus izin-

nya. Ada tiga fase perizinan yang diurus, pertama 84,6 hektare, kedua 252,6 hektare, dan ketiga 101,5 hektare. Sisanya, 438,7 hektare, belum diketahui proses perizinannya. "Penyuapan diduga pada fase proyek pertama," kata Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif.

● AHMAD FIKRI | MAYA AYU PUSPITASARI
| CAESAR AKBAR

RALAT

Koran Tempo edisi Jumat, 19 Oktober 2018, menyebutkan PT PP Property sebagai kontraktor proyek Meikarta. Seharusnya PT PP Property bukan penggarap proyek tersebut.

Judul	Rumah untuk Rakyat Terhambat Kendala Harga Lahan dan Perizinan	Tanggal	Akhir pekan, 20-21 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (halaman 4)		
Resume	Direktur Jendral Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan pemerintah masih terus menekan angka kekurangan pasokan alias backlog perumahan yang masih tinggi.		

Rumah untuk Rakyat Terhambat Kendala Harga Lahan dan Perizinan

JAKARTA — Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Khalawi Abdul Hamid, mengatakan pemerintah masih terus menekan angka kekurangan pasokan alias *backlog* perumahan yang masih tinggi. Selama empat tahun terakhir, Khalawi menuturkan, *backlog* perumahan sudah berkurang menjadi sekitar 3,2 juta unit.

"Faktor penghambat adalah kelangkaan tanah

murah dan belum sepenuhnya kebijakan kemudahan perizinan dilaksanakan di daerah," ujar Khalawi, kemarin.

Belum lagi, kata dia, rata-rata kebutuhan perumahan tiap tahun terus meningkat. Hal tersebut bisa dilihat dari angka statistik terbentuknya kartu keluarga baru. Selain itu, harga bahan bangunan yang terus naik juga menjadi penghambat. Dengan begitu, Khalawi memastikan, pembangunan satu juta rumah belum

bisa tercapai hingga akhir tahun ini.

Khalawi menjelaskan kinerja program sejuta rumah berangsur terpenuhi sejak pertama kali dicetuskan. Pada 2015, setidaknya sudah mencapai sekitar 700 ribu unit. Angka tersebut bertambah pada 2016 yang mencapai 800 ribu unit dan disusul 900 ribu unit pada 2017. Hingga medio Oktober ini masih mencapai 850 ribu unit. "Kami optimistis target sejuta rumah bisa ter-

capai. Bahkan, kami tengah mengupayakan pada 2019 dapat melebihi sejuta unit rumah."

Menurut Khalawi, sebenarnya pemerintah sudah menyiapkan tiga strategi dalam merealisasi program satu juta rumah. Pertama, menyediakan rumah bagi penduduk melalui pembangunan rumah susun sederhana sewa (*rusunawa*), lalu rumah khusus (*rusus*), dan rumah swadaya lewat program bantuan stimulan perumahan swadaya.

Kedua, pemerintah menyediakan subsidi. Ketiga, pemerintah mengeluarkan kebijakan kemudahan perizinan bagi perumahan non-subsidi yang dibangun oleh pengembang dan pembangunan secara swadaya oleh masyarakat.

Khalawi menuturkan, pemerintah tengah membentuk sistem bank tanah, mendorong daerah untuk mempermudah perizinan perumahan, mendorong pembangunan kota baru, dan kerja sama anta-

ra pemerintah dan badan usaha dalam pembangunan perumahan. Selain itu, pemerintah sedang mengembangkan teknologi bahan serta metode pembangunan rumah murah seperti rumah instan sederhana sehat (*risha*). "Perkembangan anggarannya kurang-lebih sampai pertengahan Oktober sudah 60 persen. Ini bagian dari 50 persen anggaran pemerintah pusat dalam mendukung program sejuta rumah," ujar di. • LARISSA HUDA

Judul	Berita Foto	Tanggal	Senin, 22 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (halaman 2)		
Resume	Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah Kuat Aman Cepat (Kumac) di Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, kemarin.		



Rumah Aman. Pekerja menyelesaikan pembangunan rumah Kuat Aman Cepat (Kumac) di Desa Kekait, Kecamatan Gunungsari, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, kemarin. Rumah tipe 36 berbahan dasar styrofoam dan serat fiber tersebut dijual Rp.50 juta per unit.

Judul	Dua Ruas Jalan Tol Baru Beroperasi Bulan Ini	Tanggal	Senin, 22 Oktober 2018
Media	Koran Tempo (halaman 20)		
Resume	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan meresmikan sejumlah ruas jalan tol bulan ini, yakni tol Pejagan-Pemalang seksi 3 dan seksi 4 serta bagian pertama tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocini).		

Dua Ruas Jalan Tol Baru Beroperasi Bulan Ini

Peresmian tol Pejagan-Pemalang dijadwal ulang.

Yohanes Paskalis
yohanes.paskalis@tempo.co.id

JAKARTA — Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan meresmikan sejumlah ruas jalan tol bulan ini, yakni tol Pejagan-Pemalang seksi 3 dan seksi 4 serta bagian pertama tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocini). Kepala Pusat Komunikasi Publik Kementerian PUPR, Endra Saleh Atmawidjaja, mengatakan lembaganya masih menyesuaikan jadwal dengan kesediaan waktu Presiden Joko Widodo. "Peresmian tetap dikejar bulan ini karena sudah sangat siap beroperasi," ujar Endra kepada *Tempo*, kemarin.

Endra mengakui bahwa peresmian dua bagian tol Pejagan-Pemalang, yaitu ruas Brebes Timur sepanjang 37,3 kilometer hingga

Pemalang, sempat tertunda. Peresmian yang seharusnya berlangsung pada 19 Oktober lalu dibatalkan karena perubahan kegiatan Presiden Jokowi. Penjadwalan ulang, ujar Endra, akan diselenggarakan dengan peresmian tol Bocimi seksi 1, Ciawi-Cigombong, sepanjang 15,4 kilometer. "Peresmian Bocimi belum disertai penetapan tarif karena kami menunggu usul dari Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)," ucapnya.

Pemerintah sebelumnya menargetkan peresmian 13 ruas tol hingga akhir tahun ini. Namun BPJT baru akan memutuskan skema tarif pada satu ruas, yakni Pejagan-Pemalang seksi 3 dan seksi 4. Tarif golongan 1 pada seksi 3, Brebes Timur-Tegal Timur, sepanjang 10,4 kilometer ditetapkan Rp 10.500. Adapun kenda-



Jalan tol Bogor-Ciawi-Sukabumi (Bocimi) seksi I di Ciawi, Bogor, Jawa Barat, 15 Oktober lalu.

raan golongan II dan III akan membayar Rp 15.500, sementara golongan IV dan V sebesar Rp 21 ribu. Pada seksi 4, Tegal Timur ke Pemalang, BPJT mematok Rp 27 ribu untuk kendaraan golongan 1, sementara golongan II dan III sebesar Rp 40.500, serta tarif Rp 54 ribu untuk kendaraan yang lebih besar.

Kepala BPJT Herry Trisaputra Zuna mengatakan ruas tol yang telah selesai dibangun harus menjalani uji laik fungsi untuk dapat diresmikan. Namun ia mengklaim pembangunan bagian utama pada seluruh ruas yang akan diresmikan pada 2018 telah selesai. "Waktunya masih ada,"

ucapnya.

Menteri PUPR Basoeki Hadimoeljono mengatakan total panjang 13 ruas tol tersebut mencapai 473,9 kilometer. Jumlah itu akan menambah capaian pembangunan tol di Indonesia. Apalagi sudah ada 332 km jalan tol yang terbangun pada periode 2015 hingga 2017. Sejak Januari hingga

September tahun ini, dia menambahkan, sudah ada 136,1 km ruas tol yang beroperasi.

Pemerintah sudah menjadwalkan peresmian dua ruas tol pada bulan depan, yakni ruas Pemalang-Batang seksi 1 dan 2 sepanjang 33,8 km serta ruas Semarang-Solo seksi 4 dan 5 sepanjang 32,5 km. Ada juga rencana peresmian tujuh ruas lainnya dengan total panjang 292,8 km pada Desember 2018.

Direktur Utama PT Waskita Toll Road, Herwi-diakto, memastikan seluruh komponen tol Pejagan-Pemalang seksi 3 dan seksi 4 siap beroperasi. Waskita Toll Road merupakan pengelola dua tol yang akan diresmikan bulan ini. "Pintu keluar Tegal Timur dan pintu Gandulan di Pejagan-Pemalang siap melayani transaksi," katanya kepada *Tempo*. "Sementara di tol Bocimi masih harus ikut uji laik operasi pada pekan ini."

● FAJAR PEBRIANTO | EGI ADHYATAMA

Judul	Panel Rumah Instan Dinantikan	Tanggal	Sabtu, 20 Oktober 2018
Media	Kompas (halaman 2)		
Resume	Minat masyarakat korban gempa di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, membangun rumah instan sederhana sehat atau risha terkendala ketersediaan panel, material utama konstruksi hunian yang diklaim tahan gempa itu.		

REHABILITASI PASCAGEMPA

Panel Rumah Instan Dinantikan

MATARAM, KOMPAS — Minat masyarakat korban gempa di Lombok dan Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, membangun rumah instan sederhana sehat atau risha terkendala ketersediaan panel, material utama konstruksi hunian yang diklaim tahan gempa itu.

"Satu risha butuh 138 panel. Kami siap membangun risha untuk 40 keluarga, tetapi baru terealisasi 3 unit," ujar Ketua Koordinator Tim Teknis sekaligus Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Permukiman Kabupaten Lombok Barat Lalu Ratnawi, Jumat (19/10/2018), di Giri Menang, Pusat Pemerintahan Kabupaten Lombok Barat.

Menurut Ratnawi, panel risha dikerjakan pabrikan badan usaha milik negara. "Kami kira panel itu dicetak di Pulau Jawa, jadi tinggal kirim. Ke-

nyataannya pencetakannya di sini (Lombok)," ujarnya. Untuk tahap I rehabilitasi dan rekonstruksi rumah di Lombok Barat, dari 379 keluarga, sejumlah 176 keluarga ingin risha.

"Mereka membutuhkan panel. Kalau yang 40 unit sulit, bagaimana dengan ribuan rumah lainnya," kata Ratnawi.

Rumah model risha menggabungkan komponen panel beton dan mur-baut. Dindingnya bisa memakai batu bata, kayu, multipleks, gipsum, atau kalsiboard beratap rangka baja ringan. Ketidaksiapan pabrik berdampak pada lambannya realisasi risha.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memastikan kesiapan dana stimulan rehabilitasi dan rekonstruksi rumah warga terdampak gempa. Kementerian Keuangan telah mentransfer dana Rp 960 miliar kepada war-

ga terdampak gempa untuk mulai membangun rumah. Permasalahannya ada pada pengadaan komponen risha.

"Artinya sudah mulai dibangun, materialnya siap tidak? Bukan hanya yang risha, melainkan juga semen dan bahan bangunan yang lain," kata Presiden Joko Widodo saat rapat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi NTB dan para bupati yang wilayahnya terdampak gempa, Kamis (18/10), di Bandara Internasional Lombok Praya.

Ketersediaan bahan bangunan risha itu menjadi perhatian Presiden karena animo masyarakat cukup tinggi. Pemerintah pun perlu segera menyiapkan komponen risha. "Ini yang terus saya lihat, nanti saya perintahkan segera ditambah cetakan (panel risha)," ujar Presiden. (RUL)

Judul	Jembatan Musi IV Tersambung	Tanggal	Minggu, 21 Oktober 2018
Media	Kompas (halaman 11)		
Resume	Jembata Musi IV Palembang akhirnya tersambung Jumat malam.		

INFRASTRUKTUR DAERAH

Jembatan Musi IV Tersambung

PALEMBANG, KOMPAS — Jembatan Musi IV Palembang akhirnya tersambung, Jumat (19/10/2018) malam. Jembatan sepanjang 1.130 meter dengan lebar 12 meter itu diharapkan mengurangi beban kendaraan di Jembatan Ampera.

Jembatan di atas Sungai Musi itu mengusung teknologi *extra-dosed* (perpaduan kabel dengan gelagar kotak/*box girder*) yang diklaim lebih tahan gelombang, termasuk gempa.

"Jembatan dirancang tahan hingga 100 tahun," kata Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional V Palembang Ki Agus Syaiful Anwar, saat pengecoran terakhir, Jumat malam.

Jembatan jenis itu diklaim hanya ada 70 di dunia. Jembatan tersebut dibangun kontraktor PT Adhi Karya. Menurut Syaiful, jembatan dilengkapi pendeteksi dini risiko kerusakan secara waktu nyata (*real-time*).

Saat ini, pengerjaan Jembatan Musi IV sudah mencapai 97 persen. Selanjutnya, pengerjaan memasuki tahap penyelesaian akhir, termasuk memasang ornamen. Setelah itu, akan dilakukan uji layak fungsi, termasuk analisis lalu lintas.

Syaiful berharap, dengan adanya jembatan itu, beban kendaraan di Jembatan Ampera bisa dikurangi. Menurut rencana, Jembatan Musi IV akan diresmikan Presiden Joko Widodo.

Getaran diminimalkan

Pejabat Pembuat Komitmen Proyek Musi IV, Suwarno, mengatakan, konsep jembatan ini berbeda dengan Jembatan Barelang di Kepulauan Riau atau Jembatan Suramadu di Jawa Timur, yang menerapkan konsep *cable stayed*. Keunggulan Musi IV karena dibangun dengan menara lebih pendek sehingga risiko getar diminimalkan.

Jembatan Suramadu dan Barelang memiliki ketinggian menara sekitar 50 meter, sedangkan tinggi menara Jembatan Musi IV hanya 17 meter sehingga lebih tahan guncangan.

Syaiful menyebutkan, setelah proyek Musi IV, menurut rencana, akan dibangun Jembatan Musi III dan VI. Bahkan, Musi III akan menerapkan sistem *tunnel* (terowongan). "Namun, pada 2019, pemerintah menghentikan pembangunan infrastruktur dengan konsep pembiayaan *multi-years*. Baru akan dimulai lagi pada 2020," ujarnya.

Berbeda dengan Jembatan Musi IV, Jembatan Musi VI masih terkendala pembebasan lahan untuk jalan akses. Pejabat Pembuat Komitmen Jembatan Musi VI, Fauzi, mengatakan, pengerjaan jembatan utama sudah selesai. Saat ini yang menjadi fokus utama adalah penyelesaian masalah jalan akses. (RAM)